

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. 2005.
- . *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Budiarti, Rita Triana. *On The Record Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Fadjar, A. Mukhtie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Hadi, Nuruddin. *Wewenang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Hakim, Abdul Aziz. *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Handayono, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Hanin, Muslimah. *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FHUII Press, 2018.
- . *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- . “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Hukum*. Vol. 18, 2011.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media dan Nuansa, 2006.
- Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose, 2015.

- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- MD, Mohammad Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- . *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- . *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Priyono, Herry dkk, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara, 2012.
- Revitch, Diane. *Demokrasi Klasik & Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Safa'at, Muchammad Ali. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011.
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006.
- Satriawan, Iwan dkk. *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.
- . *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tim Peneliti Perludem, *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*. Jakarta: Perludem, 2006.
- Tim Penyusun MKRI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Widodo, Heru. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

- Arifin, Muhammad Daniel. "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang". *Jurnal Swara Justisia*. Vol. 6, 2022.
- Bisariyadi. "Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 49, 2019.
- Eriza, Winda Maylen & Dasril Radjab. "Tinjauan Putusan MK Nomor 31/PHP.Gub – XV/2017 Tentang PHP Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017". *Journal of Constitutional Law*. Vol. 1, 2021.
- Hadiawan, Agus. "Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Provinsi Lampung (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro Dan Kota Bandar Lampung)". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*. Vol. 3, 2009.
- Kurniawan, Hamdan. "Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab". *Jurnal KPU*. 2020.
- Nugroho, Fajar Heri dkk. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menetapkan Suara yang Sah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Labuhanbatu Tahun 2020". *Jurnal Ikamukum*. Vo. 1, 2021.
- Maulidin, La Ode. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif". *Jurnal Konstitusi*. Vol. IV, 2011.

- Pasaribu, Alboin, dan Intan Permata Putri. “Prospek Penjatuhan Putusan Provisi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18, 2021.
- Pramusinto, Agus. “Otonomi Daerah Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004”. *Jurnal Analisis CSIS*. Vol. 33, 2004.
- Sumadi, Ahmad Fadil. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8, 2011.
- Umar, Hasbi. “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD”. *Jurnal Innovatio*. Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008.
- Zoelva, Hamdan. “Problematisa Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3209, Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan MK Nomor 08/PERATURAN MK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa.
- Peraturan MK No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- Peraturan MK No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
- Peraturan MK No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
- Peraturan MK No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Walikota Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bertanggal 30 Juni 2010.
- Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
- Putusan Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Tahun 2015.
- Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Tahun 2015.
- Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2015.
- Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015.
- Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Tahun 2017.
- Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017.
- Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2017.
- Putusan Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017.
- Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tahun 2017.

Putusan Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tahun 2017.

Putusan Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Internet:

Adistya, Devira Marsha. “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara”. Universitas Jember, 2017.

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/83681/DEVIRA0MRSHA%20ADISTYA%20-%201207101012441.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Huefner, Steven F. *Remedying Election Wrongs*. www.ssrn.com. Diunduh pada Jumat, 13 Oktober, Pukul 13.00 WIB.

Muhammad, Fadel. “Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. Universitas Hasanuddin, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/89564657.pdf>.